

## KEKAYAAN JADI INCARAN BANYAK NEGARA

# Desa Ujung Tombak Jaga Pancasila dan NKRI

**WONOSARI (KR)** - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-MPR RI Drs HM Idham Samawi mengingatkan, kekayaan alam Indonesia yang melimpah sejak dulu menjadi incaran banyak negara. Untuk menjaga sumber daya manusia (SDA) agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, seluruh warga masyarakat wajib menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ulu-ulu (Bagian Kemakmuran) di desa-desa (kalaharahan) sebagai di garda terpedan dan selalu berada di tengah-tengah masyarakat harus menjadi ujung tombak dalam menjaga negara kesatuan dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada warganya.

"Nilai-nilai Pancasila wajib ditanamkan dari keluarga, lingkungan masyarakat dan seluruh warga bangsa," kata Drs HM Idham Samawi yang

juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dalam sosialisasi empat pilar dengan tema, Desa Sebagai Benteng Ideologi Pancasila di RM Sejo Abang, Wonosari, Rabu (9/8).

Hadir dalam acara ini Ketua Aliansi Bela Garuda (ABG) DIY Is Purwanto SH, Ketua Gerbang Desa Sriyanto dan 114 Ulu-ulu serta stafnya dari seluruh kalurahan di Gunungkidul. Selain Anggota MPRI Drs HM Idham Samawi, nara

sumber lain ST Agung Budiawan. Desa sebagai benteng Ideologi Pancasila, aparatnya harus menjadi pelopor pengamalan nilai Pancasila dan mensosialisasikan kepada anak-anak, keluarga dan masyarakat.

Dalam era globalisasi, banyak negara yang ingin mendapatkan bahan-bahan tambang yang dimiliki Indonesia.

Negara-negara tersebut menggunakan berbagai cara agar dapat memperoleh tambang-tam-

bang itu. Untuk dapat menguasai bahan tambang, ada negara yang berusaha adu domba untuk memecah negara kesatuan Indonesia.

"Oleh sebab itu untuk menjaga NKRI senjata yang paling ampuh adalah dasar negara Pancasila harus menjadi nafas setiap pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia," tambahnya.

Setiap rakyat harus menjaga keberagaman, menjaga kesatuan dan setiap pemimpin baik itu lurah, penewu, bupati, Gubernur dan Presiden setiap nafasnya harus mengandung nilai-nilai Pancasila dan wajib di amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berkat Pancasila sampai sekarang NKRI tetap terjaga, kita mempunyai



**Drs HM Idham Samawi sampaikan sosialisasi empat Pilar kepada Ulu-Ulu se Gunungkidul.**

ribuan pulau, lebih dari 700 suku, serta banyak bahasa dan agama, tetapi berkat Pancasila kerukunan tetap terjaga.

Ada beberapa negara yang hanya mempunyai beberapa suku saja sudah pecah.

keberagaman, kita rawat NKRI agar segera terwujud masyarakat yang adil makmur dan sejahtera," tambahnya. (Ewi)

## Pemkab Usulkan 450 Formasi PPPK 2023

**WATES (KR)** - Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kulonprogo, Sudarmanto SIP menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo mengusulkan sekitar 450 formasi untuk penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023.

"Usulan telah kami sampaikan dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan aparat sipil negara (ASN) tahun anggaran 2023 di Jakarta pada Kamis (3/8) lalu," kata Sudarmanto, Selasa (8/8). Dijelaskan, sekitar 450-

an formasi tersebut diusulkan melalui berbagai tahapan dan saat ini pihaknya menunggu penetapan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB).

"Kami mengusulkan sekitar 450an, tapi yang disetujui tidak sampai segitu. Karena pemerintah pusat punya kebijakan sendiri terkait penerimaan PPPK," jelas Sudarmanto.

Pemkab Kulonprogo mengungkapkan memprioritaskan untuk penerimaan formasi tenaga kesehatan (Nakes). Lantaran di Kulonprogo masih terjadi

kekurangan nakes baik 12 puskesmas maupun dua rumah sakit umum daerah (RSUD). Selanjutnya, formasi guru yang menjadi bagian dari pelayanan langsung terhadap masyarakat di sekolah. Sektor lain tenaga teknis meliputi ahli kebijakan, penyuluh pertanian dan tenaga teknis lainnya.

Pemkab Kulonprogo masih menunggu jadwal pengadaan ASN karena bersifat terintegrasi antara panitia seleksi nasional (panselnas) dan panitia daerah, tapi informasi yang kami terima diadakan tahun ini," terang Sudarmanto MSi. (Rul)

## UJIAN PRAKTIK SIM Mulai Dilakukan Penerapan Lintasan Baru

**WONOSARI (KR)** - Perubahan dan mekanisme kepengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru tidak hanya pada saat ujian praktik tetapi Sesuai Peraturan Kepolisian No 2/2023 tentang Perubahan Peraturan Kepolisian No 5/2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM, pemohon wajib melampirkan kepesertaan BPJS Kesehatan.

Aturan baru tersebut sudah diberlakukan sejak awal minggu ini dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Bintara Urusan (Baur) SIM, Satpas Polres Gunungkidul, Aiptu Aris Puji Yuana ada sejumlah



**Ujian praktik SIM aturan baru di Gunungkidul.**

perubahan berkaitan dengan proses permohonan SIM yang berlaku di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Gunungkidul. Perubahan tidak hanya

menyangkut ujian praktik yakni jalur zigzag dan angka delapan dihapus.

"Persyaratan ujian praktik diganti jalur huruf S, tetapi juga ada penambahan syarat untuk permohonan," katanya, Rabu (9/8). Sesuai aturan Kepolisian No 2/2023, pemohon diwajibkan melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan. Meski demikian hingga sekarang masih dalam tahap sosialisasi. Adapun teknis pelaksanaannya masih menunggu instruksi lebih lanjut yang butuh sosialisasi dan tidak serta merta langsung dijalankan. Jadi, untuk pelaksanaan masih menunggu instruksi. Mengenai ujian praktik SIM baru tersebut, pihaknya sudah melakukan perubahan terkait dengan model ujian. (Bmp)

## DIKUKUHKAN PENJABAT BUPATI FKUB Harus Jaga Keharmonisan

**WATES (KR)** - Jajaran Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kulonprogo yang baru diminta untuk mampu mengemban, menjalankan ketugasan dengan baik dan membawa perdamaian serta keharmonisan di wilayah Kulonprogo ke arah yang lebih baik lagi di tengah keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat.

"Kita patut bersyukur dengan adanya keberagaman tersebut. Selama ini di Kulonprogo tidak terjadi gesekan-gesekan antarumat beragama. Hal itu buah hasil kerjasama seluruh elemen yang komitmen menjaga keharmonisan," tegas Pj Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti ST MT saat pengukuhan Pengurus FKUB Kulonprogo periode 2023 - 2028 di



**Pj Bupati Ni Made (kanan) menyerahkan bendera merah putih pada Pengurus FKUB Kulonprogo.**

Ruang Rapat Sermo Kompleks Pemkab setempat, Selasa (8/8).

Ni Made juga minta jajaran FKUB berperan aktif dalam menyukseskan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Menurutnya potensi-potensi kerawanan menjelang Pemilu 2024 bisa saja terjadi jika penyelenggara pemilu tidak memba-

ngun kerja sama dengan FKUB, karena sebagian besar masalah timbul di luar dari masalah pemilu itu sendiri.

"FKUB sangat penting dilibatkan dalam setiap kegiatan kebangsaan di Indonesia, termasuk kegiatan Pemilu 2024, sebab FKUB adalah partner atau mitra strategis pemerintah," jelasnya. (Rul)

## ALUN-ALUN WONOSARI DIBONGKAR Upacara HUT RI Pindah ke Stadion Handayani

**WONOSARI (KR)** - Dampak pembangunan Alun-alun Wonosari belum tuntas menyebabkan upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 terpaksa dipindahkan ke Stadion Gelora Handayani, Jeruksari, Kapanewon Wonosari.

Persiapan pindahan kegiatan upacara sudah mulai

beberapa waktu lalu. Seperti pemancangan tempat pengibaran bendera dan sebagainya. Bahkan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) sudah melakukan pematangan pelatihan di Stadion Gelora Handayani. "Paskibraka sudah berlatih di stadion," kata Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Gunungkidul Supriyanto SE

MT, kemarin.

Pemilihan Stadion Handayani diputuskan dalam rapat yang dihadiri pelatih dari TNI dan Polri, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan bagian protokol Pemkab Gunungkidul. Pertimbangannya, di stadion Handayani tempat parkir memadai, persiapan paskibraka representatif, ketersediaan arena peserta upacara, masyarakat dapat menyaksikan di tribun tertutup maupun terbuka, paskibraka juga lebih fokus karena arenanya steril dan dilengkapi sarana dan prasarana yang baik, untuk latihan fisik, baris berbaris, latihan formasi, pemberian materi wawasan kebangsaan, tersedianya toilet banyak. "Perijinan penggunaan tidak masalah karena milik Pemkab sendiri," tambahnya. (Ewi)



**Suasana Alun-alun Wonosari dalam proses pembangunan.**

## PENUTUPAN MTQ Pengaruh Medsos Tak Terhindarkan Lagi

**PENGASIH (KR)** - Pj Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti ST MT mencermati kondisi saat ini, pengaruh media sosial sudah sangat melekat di lingkungan pelajar. Melalui HP dengan mudah para pelajar dapat mengakses semua informasi, gambar atau foto, video, baik yang bersifat positif ataupun negatif. Oleh sebab itu, perlu perhatian yang serius dari orangtua dan berbagai pihak untuk mendidik anak-anaknya dengan mengawasi dan mengarahkan mereka.

"Ini semua tentu demi kepentingan generasi penerus kita, agar menjadi generasi yang religius, beretika, berbudaya, berkeadilan dan bertanggungjawab," ujar Ni Made Dwipanti Indrayanti ST MT saat menutup pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Pelajar jenjang SD dan SMP Tingkat Kabupaten Kulonprogo 2023, di SMP N 1 Pengasih, Rabu siang (9/8).

"Saya sangat bangga, karena kegiatan lomba MTQ ini diikuti oleh para pelajar jenjang SD dan SMP. Ini menunjukkan kepekaan kita untuk mengantisipasi dan meng-

antisipasi mental dan rohani generasi penerus kita kepada sesuatu yang bernilai positif dalam upaya memberantas pengaruh negatif yang saat ini begitu gencar melanda generasi muda melalui media sosial yang tidak bisa kita hindari la-



**Pj Bupati Ni Made Dwipanti Indrayanti menyerahkan trofi juara MTQ.**

gi," kata Ni Made.

Disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulonprogo Arif Prastowo SSo MSi, kegiatan MTQ bertema "Dengan MTQ Pelajar Kita Wujudkan Generasi Muda yang Unggul dan Berkeadilan Quran".

"MTQ Pelajar SD dan SMP ini diikuti 300 siswa

terdiri 192 siswa SD dan 108 siswa SMP. Cabang lomba sebanyak 15 cabang termasuk kebersihan masjid/ musala sekolah. Sebelum ke tingkat kabupaten, para pelajar tingkat SD diseleksi di 12 kapanewon dan SMP di Eks wilayah Pembantu Bupati (Tuti)," ujar Arif. (Wid)

## JELANG PEMILU SERENTAK 2024 ASN Ikrar Jaga Netralitas, Melanggar Ditindak Tegas



**Para pejabat di lingkungan Pemkab Kulonprogo menunjukkan fakta integritas akan bersikap netral pada Pemilu 2024.**

**WATES (KR)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo mewajibkan aparat sipil negara (ASN) menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Peringatan tersebut sebagai tindak lanjut Surat Edaran tanggal 2 Agustus 2023 nomor 800/1417 tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

"Dalam surat tersebut sudah sangat tegas para ASN dan Non ASN

di lingkungan pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2024," tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo Triyono SIP MSi saat memimpin apel Ikrar Netralitas ASN di lingkungan Sekda setempat, Selasa (8/8).

Ditegaskan, ASN harus menjaga netralitas, tidak terlibat dalam proses kampanye maupun legebrelatif dukungan kepada calon presiden pada setiap tahap-

an Pemilu 2024. "ASN dan non ASN di pemerintah daerah harus betul-betul netral pada saat Pileg dan Pemilihan Umum 2024. Tidak boleh ada yang berbalasan, saya tidak tahu kalau ada aturan harus netral, jadi semua harus tahu," jelas Triyono.

Dengan pelaksanaan ikrar Sekda Triyono berharap setiap ASN dan non ASN mengetahui, melaksanakan dan menjaga netralitasnya dalam pemilu mendatang. Dirinya minta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melaksanakan Ikrar Netralitas ASN dan mengimbau masing-masing pimpinan OPD untuk melakukan pengawasan maupun penindakan secara tegas terhadap pelanggaran, sesuai peraturan berlaku.

"Masing-masing Kepala OPD harus memantau ASN di lingkungannya dan kalau menemukan pelanggaran segera dikordinasikan dan disampaikan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) kemudian ASN yang melakukan pelanggaran tadi akan ditindaklanjuti secara tegas," ujar Sekda Triyono. (Rul)